

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021

6.1.1. Hasil Integrasi KLHS Terhadap Dokumen RPJMD

Hasil KLHS RPJMD yang sudah diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.1 Hasil Integrasi KLHS Terhadap Dokumen RPJMD

No	Muatan Substansi RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap RPJMD
1.	Isu strategis (Bab IV)	<p>Isu strategis pembangunan berkelanjutan diatas dapat diintegrasikan kedalam BAB IV: Subbab 4.2: Isu Strategis. Adapun secara rinci integrasi isu strategis sebagai berikut :</p> <p>4.2.1. Isu Pembangunan Infrastruktur</p> <p>1). Infrastruktur sebagai komponen ruang berupa transportasi, energy, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana penunjang sosial lingkungan permukiman. Sebagai isu strategis, pembangunan infrastruktur agar aspek lingkungan lebih jelas terintegrasi. Mencermati hasil diskusi sebelumnya dan hasil kajian maka komponen berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk bisa dieksploitasi melalui:</p> <p>Usulan kalimat isu: <u>Isu pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan</u></p> <p>4.2.4. Isu Strategis Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>1). Point a: Isu Perkembangan Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Diusulkan ada kalimat tambahan permasalahan terkait: <u>Kesenjangan pendapatan masyarakat dan kesenjangan antar wilayah</u></p>

No	Muatan Substansi RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap RPJMD
		<p>2). Point b: Isu Ketahanan Pangan dan Energi Diusulkan ada kalimat tambahan permasalahan terkait: <u>Alih fungsi lahan pertanian</u></p> <p>4.2.5. Isu Strategis Perlindungan Lingkungan Hidup Implementasi <i>Green Economy</i></p> <p>1). Point b: Isu Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam Diusulkan ada tambahan kalimat terkait permasalahan: <u>Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di kawasan lindung.</u></p> <p>2). Point c: Isu Pelestarian Lingkungan Hidup Dengan Adanya Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Diusulkan ada tambahan kalimat terkait permasalahan: <u>Kemerosotan keanekaragaman hayati, Meningkatnya luasan lahan kritis, Ketersediaan sumber air baku menurun, dan Menurunnya kualitas sumber daya air bersih.</u></p>
2.	Visi, misi, tujuan dan sasaran (Bab V)	<p>Berdasarkan kajian konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah (RPJMD) rancangan awal RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan yang meliputi Prinsip Keterkaitan, Keseimbangan, dan Keadilan, maka diusulkan untuk menambahkan beberapa hal:</p> <p>1). Catatan Perbaikan terhadap Tujuan dan Sasaran: Dalam pembangunan berkelanjutan aspek lingkungan mengandung arti bahwa pembangunan yang dilakukan harus dapat mengurangi sebesar-besarnya penurunan kualitas lingkungan hidup dan harus dapat mensejahterakan masyarakat.</p> <p>Terkait dengan tujuan ke 2 RPJMD “<i>Meningkatkan daya saing perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan</i>”, menurut kamus besar bahasa indonesia, arti kata bersahabat dengan kata dasar “sahabat” adalah teman. Hal ini kurang sesuai dengan konsep dari pembangunan berkelanjutan di</p>

No	Muatan Substansi RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap RPJMD
		<p>mana aspek lingkungan dipandang sebagai “cara pandang” secara menyeluruh sebagai supply dalam aspek sosial dan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam kamus bahasa indonesia, cara pandang disebut juga dengan “wawasan”, sehingga alternatif perbaikan pada tujuan ke 2 RPJMD lebih ditekankan pada perbaikan kosa kata yang digunakan dan diharapkan dapat memperluas arti, sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan mempunyai artian upaya sadar dan terencana yang dilakukan menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan.</p> <p>Usulan kalimat Tujuan 2: <u>Meningkatkan daya saing perekonomian yang berwawasan lingkungan</u></p>
3.	Strategi dan arah kebijakan umum (Bab VI)	<p>Adapun secara rinci integrasi strategi dan arah kebijakan umum sebagai berikut :</p> <p>a. Strategi Pembangunan Daerah</p> <p>Berdasarkan hasil kajian KLHS Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, dirumuskan beberapa masukan terkait dengan program dan kegiatan prioritas yang diindikasikan menimbulkan dampak terhadap pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Program tersebut meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program pembangunan jalan dan jembatan (pembangunan jalan dan jembatan baru, dan pemeliharaan) 2) Program penyediaan dan pengelolaan air baku 3) Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 4) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 5) Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

No	Muatan Substansi RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap RPJMD
		<p>Dari program dan kegiatan prioritas tersebut memberikan pengaruh terhadap strategi dan arah kebijakan umum yang terdapat pada rancangan RPJMD Kabupaten Boyolali. Strategi dan arah kebijakan umum yang terpengaruh program dan kegiatan prioritas adalah :</p> <p>1) Strategi nomor 3: “Pemenuhan dan pemerataan akses infrastruktur”</p> <p>Berdasarkan hasil kajian, bahwa dalam pemenuhan pembangunan dan pemerataan akses infrastruktur diharapkan dapat menghindari alih fungsi terhadap lahan pertanian yang produktif terutama LP2B sehingga keberlangsungan ketersediaan pangan di Kabupaten Boyolali dapat dipertahankan. Sehingga strategi nomor 3 perlu ditambahkan “Pemenuhan dan pemerataan akses infrastruktur <u>secara berkelanjutan</u>”</p> <p>2) Strategi nomor 13: “Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian”</p> <p>Berdasarkan hasil kajian terhadap Rancangan RPJMD Kabupaten Boyolali, dalam peningkatan produksi pertanian dilakukan beberapa upaya yang direkomendasikan untuk dikembangkan dalam peningkatan sarana prasarana pertanian yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas lahan. Upaya tersebut melalui pembangunan embung yang berfungsi untuk irigasi, sehingga keberlangsungan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian dapat berlangsung secara berkesinambungan. Untuk itu, strategi nomor 13 perlu ditambahkan “Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian <u>secara berkelanjutan</u>”.</p> <p>b. Strategi dan Arah Kebijakan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah Terpadu</p> <p>Berdasarkan hasil kajian KLHS Rancangan RPJMD Kabupaten Boyolali yang menekankan pada aspek keberlanjutan dalam mewujudkan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati guna</p>

No	Muatan Substansi RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap RPJMD
		<p>mewujudkan pembangunan di Kabupaten Boyolali melalui visi yang tertuang di dalam Rancangan RPJMD, melalui Visi “Maju” akan dicapai melalui misi meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah serta memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup, maka dalam perumusan kebijakan umum perlu ditambahkan pada:</p> <p>6.3.1. Strategi Penataan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah Terpadu.</p> <p>Yang perlu ditambahkan pada:</p> <p>1) Huruf e nomor 1 yaitu “Mengembangkan sarana prasarana sesuai skala pelayanannya” perlu ditambah menjadi “Mengembangkan sarana prasarana sesuai skala pelayanan <u>dan memperhatikan kebijakan tata ruang</u>”</p>
4.	Kebijakan umum dan program pembangunan daerah (Bab VII)	<p>Adapun secara rinci integrasi kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai berikut:</p> <p>1). Tabel VII.1. Misi 1, Boyolali melanjutkan semangat Pro Investasi</p> <p>Urusan: Lingkungan Hidup</p> <p>Kebijakan 3:</p> <p>Meningkatkan pengelolaan sampah mandiri</p> <p>Tambahkan muatan substansi dalam kebijakan umum terkait: <u>Upaya dalam meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ramah lingkungan</u></p> <p>Kebijakan 4:</p> <p>Meningkatkan kecukupan kebutuhan air baku untuk air minum dan pertanian.</p> <p>Tambahkan muatan substansi dalam kebijakan umum terkait: <u>Upaya dalam meningkatkan penyediaan sempadan di sekitar sumber air baku (sempadan mata air, waduk, embung dan bendung)</u></p>

Sumber : Dokumen Pelaksanaan KLHS RPJMD 2016-2021

6.1.2. Hasil Rekomendasi Program Prioritas

Berdasarkan hasil kajian KLHS Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, dirumuskan beberapa masukan terkait dengan program dan kegiatan prioritas yang diindikasikan berpotensi menimbulkan

dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Adapun program prioritas dan kegiatan yang disepakati sebagai prioritas program dapat dilihat pada tabel berikut:

- 1) Program pembangunan jalan dan jembatan (pembangunan jalan dan jembatan baru, dan pemeliharaan)

Kegiatan:

 - a. Pembangunan jalan dan jembatan baru
 - b. Peningkatan jalan dan jembatan (pemeliharaan)
- 2) Program penyediaan dan pengelolaan air baku

Kegiatan:

Pembangunan embung fungsi air baku
- 3) Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Kegiatan:

Pembangunan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu)
- 4) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Kegiatan:

Pembangunan embung fungsi irigasi
- 5) Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

Kegiatan:

 - a. Pembangunan Rumah Sakit Simo
 - b. Pengembangan Rumah Sakit Andong

Dari pengaruh yang diberikan oleh program-program prioritas tersebut dirumuskan mitigasi/adaptasi hingga alternatif yang akan dimasukkan dalam rekomendasi perbaikan kebijakan, rencana dan/atau program. Secara rinci rekomendasi yang diberikan oleh Pokja Pengendalian Lingkungan terhadap kebijakan, rencana dan program prioritas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel VI. 2 Hasil Rekomendasi Program Prioritas

NO	Rumusan Program Pembangunan	REKOMENDASI
1)	Pembangunan jalan dan jembatan Meliputi : - Pembangunan jalan tol - Pembangunan jalan dan jembatan baru - Peningkatan jalan dan jembatan (pemeliharaan)	Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan dengan : a. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif b. Mengupayakan peningkatan fungsi resapan air melalui penanaman pohon dan pembuatan saluran drainase di koridor jalan c. Memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang

NO	Rumusan Program Pembangunan	REKOMENDASI
		d. Memaksimalkan lahan ruang milik jalan pada saat kegiatan pelebaran jalan
2)	Program penyediaan dan pengelolaan air baku Kegiatan : ▪ Pembangunan embung air baku	Pembangunan embung dilakukan dengan : a. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif b. Menyediakan zona hijau disekitar embung yang berfungsi sebagai sempadan embung
3)	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Kegiatan : ▪ Pembangunan embung irigasi	c. Memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang d. Memperhatikan penataan lingkungan disekitar kawasan embung e. Menyusun tahapan penataan sarana dan prasarana pencegahan dampak lingkungan
4)	Program pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan Kegiatan : ▪ Pembangunan TPST	Pembangunan TPST dilakukan dengan : a. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif b. Memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang (pengendalian). c. Pembuatan <i>buffer zone</i> sekitar lokasi TPST d. Pembangunan sumur pantau untuk memantau kualitas air disekitar lokasi TPST
5)	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Kegiatan : ▪ Pembangunan RSUD Simo ▪ Pengembangan RSUD Andong	Pembangunan RSUD Simo dan pengembangan RSUD Andong dilakukan dengan : a. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif b. Memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang (pengendalian). c. Pembangunan embung, sumur resapan dan biopori untuk menjaga keseimbangan karena berkurangnya luasan resapan air d. Upaya peningkatan fungsi resapan air melalui penanaman pohon dan pengadaan RTH taman di lingkungan rumah sakit

Sumber : Dokumen Pelaksanaan KLHS RPJMD 2016-2021

6.2. Strategi Pembangunan Daerah

Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran secara efektif, adapun strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Boyolali Tahun 2016–2021 sebagai berikut:

1. Misi 1: Boyolali Meneruskan Semangat Pro Investasi.
 - a. Penyediaan regulasi daerah ramah investasi;
 - b. Melanjutkan Reformasi sistem pelayanan perijinan ramah investasi;

- c. Penegakan Regulasi pengembangan bisnis/usaha ramah lingkungan;
 - d. Peningkatan RTH; dan
 - e. Menyelaraskan tumbuhnya investasi pada pengembangan produk unggulan daerah yang berwawasan lingkungan.
2. Misi 2: Boyolali Membangun Untuk Untuk Lebih Maju Dan Berkelanjutan.
- a. Pengembangan kerjasama multi pihak untuk pembangunan infrastruktur, termasuk partisipasi masyarakat;
 - b. Pengembangan infrastruktur yang mengungkit pencapaian daya saing ekonomi, Kabupaten Hijau, Kabupaten Cerdas (*Smart City*); dan
 - c. Pengembangan infrastruktur mendasarkan rasio kebutuhan pelayanan publik.
3. Misi 3: Boyolali Bersih, Berintegritas, Sejahtera.
- a. Peningkatan kualitas perencanaan, tata laksana penganggaran, pengelolaan keuangan daerah dan sinergitas sistem informasi daerah dengan sistem informasi pemeriksaan serta peningkatan kapasitas pemeriksa/auditor;
 - b. Pengaturan struktur organisasi pemerintah beserta infrastruktur pendukungnya sesuai rasionalitas tuntutan kebutuhan berdasarkan regulasi yang berlaku;
 - c. Optimalisasi kemandirian pelayanan masyarakat;
 - d. Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
 - e. Penyediaan ruang monitoring, evaluasi, dan komplain;
 - f. Peningkatan upaya pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; dan
 - g. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
4. Misi 4: Boyolali Sehat, Produktif, Berdaya Saing.
- a. Peningkatan produktivitas UMK, kualitas produk dan jangkauan pemasarannya;
 - b. Peningkatan kemampuan berusaha bagi perempuan;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
 - d. Pemerataan infrastruktur kesehatan;
 - e. Peningkatan kesadaran masyarakat promosi dan preventif kesehatan;
 - f. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan anak usia dini, dasar dan masyarakat serta peningkatan kualitas manajemen pelayanannya;
 - g. Pemerataan infrastruktur pendidikan formal dan non formal;
 - h. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan;

- i. Pengembangan produktivitas dan kualitas hasil sektor industri pertanian; peternakan, perikanan untuk meningkatkan daya saing daerah;
 - j. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung perdagangan; dan
 - k. Mengembangkan sistem perdagangan untuk meningkatkan daya saing daerah.
5. Misi 5: Boyolali Lumbung Padi dan Pangan Nasional.
 - a. Peningkatan produksi pertanian dan pemasaran hasil; dan
 - b. Pengembangan teknologi untuk peningkatan nilai tambah hasil pertanian.
 6. Misi 6: Boyolali Kota Susu, Produsen Daging Dan Hasil Ternak/Perikanan.
 - a. Pengembangan kebijakan daerah yang kondusif bagi peningkatan produksi peternakan/perikanan dan pemasaran hasil produk pertanian/peternakan/perikanan; dan
 - b. Pengembangan teknologi untuk peningkatan nilai tambah hasil peternakan/ perikanan.
 7. Misi 7: Boyolali Lebih Maju Dan Berteknologi.
 - a. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pengembangan *E-governance*;
 - b. Peningkatan ketrampilan aparat memberikan pelayanan berbasis teknologi (*Smart City*); dan
 - c. Mendorong masyarakat berkolaborasi dengan pemerintah memasarkan citra dari wisata dan budaya Kabupaten Boyolali (*branding*).
1. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang ramah investasi dan berbasis teknologi informasi

Sikap, tata nilai, keterampilan, dan komitmen birokrat menjadi salah satu kunci daya tarik investor menginvestasikan sumberdayanya. Sementara perangkat teknologi informasi menjadi pendukung kelancaran proses kerja sama pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam reformasi birokrasi terkandung komponen kebijakan daerah yang reformis, struktur organisasi yang efektif, perangkat aparatur yang profesional, dan teknologi yang efisien.
 2. Reformasi tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berwawasan pembangunan berkelanjutan;

Pembangunan adalah perihal menjaga kelangsungan peradaban manusia, oleh karena itu aparat penyelenggara negara harus punya wawasan keberlanjutan kehidupan alam dan generasi mendatang. Aparat pemerintah perlu berkolaborasi dengan pihak swasta dan partisipasi masyarakat untuk

mengelola potensi daerah tanpa mengorbankan generasi mendatang. Sebaliknya, justru mengoptimalkan warisan peradaban yang luhur. Strategi ini merupakan penjaga atau kontrol supaya aktivitas ekonomi dan sosial bersifat melestarikan bumi.

3. Pemenuhan dan Pemerataan akses infrastruktur secara berkelanjutan

Infrastruktur merupakan modal dasar bagi penyelenggaraan layanan kebutuhan ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan budaya. Infrastruktur yang baik menjadi daya tarik pengunjung ke Boyolali, sehingga Boyolali menjadi daerah yang nyaman untuk berusaha, berinvestasi, disinggahi, mencari rejeki, rekreasi, maupun ditinggali.

4. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang pro kesejahteraan rakyat

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel adalah penggunaan anggaran pro rakyat. Oleh karena itu strategi ini dipilih karena mendorong integritas aparatur supaya prioritas anggaran diarahkan pada *pro job, pro growth, pro poor, dan pro environment*. Akuntabilitas adalah perihal memberikan penjelasan mengapa besaran anggaran tertentu dialokasikan ke program tertentu, dengan penerima manfaat kelompok tertentu, dan dilakukan pada kurun waktu tertentu.

5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik

Transparansi informasi pelayanan publik menjadi prakondisi peningkatan kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi ini mendorong integritas aparat pelayan publik dan mendorong partisipasi warga untuk berkolaborasi maupun sebagai pengontrol kualitas pelayanan publik.

6. Peningkatan kondusivitas sosial.

Kondusivitas daerah dan masyarakat menjadi faktor pendorong dan penghambat investasi. Semakin kondusif suatu daerah semakin menarik bagi mitra investor mengembangkan usaha yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, maupun pertumbuhan ekonomi daerah.

7. Peningkatan kesetaraan akses memperoleh pendapatan

Strategi ini penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, mengurangi ketimpangan antar kelompok masyarakat. Ketimpangan potensial memicu gangguan ketertiban dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu kesetaraan akses antar kelompok masyarakat adalah strategi meningkatkan kondusivitas daerah dan kesejahteraan

masyarakat. Peningkatan kualitas pembangunan manusia yang setara dan adil *gender*.

8. Peningkatan kualitas layanan kesehatan

Kesehatan penduduk menjadi modal dasar pembangunan. Strategi ini mencakup komponen kecukupan rasio infrastruktur kesehatan, kecukupan tenaga kesehatan, rasio cakupan layanan kesehatan. Di dalamnya termasuk pengukuran status kesehatan masyarakat selaku ukuran dampak program pembangunan bidang kesehatan.

9. Peningkatan kualitas layanan pendidikan

Sama halnya peningkatan kualitas kesehatan, strategi ini juga mencakup kecukupan infrastruktur pendidikan hingga manajemen penyelenggaraan pendidikan. Rerata tahun pendidikan masyarakat menjadi indikator dampak keberhasilan pembangunan bidang pendidikan.

Pelayanan pendidikan juga mencakup pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Strategi ini juga menjadi pemandu prioritas perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan, bahwa era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sertifikasi atau standarisasi yang dimiliki oleh pencari kerja.

10. Peningkatan daya saing industri yang berbasis sumber daya lokal

Misi Boyolali, lumbung padi dan pangan nasional dan misi Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan mengarahkan perlunya strategi untuk peningkatan daya saing industri berbasis produk hasil pertanian pangan, produk susu, daging dan hasil ternak/perikanan. Strategi ini meliputi upaya peningkatan (i) kecakapan petani, peternak, dan produsen hasil pertanian menerapkan teknologi rekayasa industri pengolahan hasil produksi pertanian, peternakan, perikanan; (ii) kecukupan infrastruktur penunjang koneksitas pengadaan bahan baku-lokasi produksi-pintu pemasaran hasil industri produksi pertanian, pengolahan hasil dan distribusi hasil produk pertanian, peternakan, perikanan. Selain hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, Kabupaten Boyolali juga merencanakan pengembangan industri pariwisata berbasis pertanian peternakan, dan perikanan untuk menambah daya saing kabupaten. Semua upaya pendukung strategi peningkatan daya saing industri yang berbasis sumber daya lokal ini semua diarahkan pada dampak hasil peningkatan kuantitas dan kualitas hasil produksi sehingga meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Strategi ini juga menjadi dasar kebijakan untuk

pengembangan daya tarik potensi pariwisata, meliputi seni budaya, cagar budaya, peninggalan sejarah, wisata religi, wisata alam, agrowisata.

11. Peningkatan daya saing perdagangan

Strategi peningkatan daya saing perdagangan disusun sebagai pelengkap strategi peningkatan daya saing industri yang berbasis sumber daya lokal. Kuantitas dan kualitas hasil produksi akan membawa dampak (*impact*) kekuatan ekonomi daerah jika didukung oleh perluasan jangkauan pemasaran. Oleh karena itu strategi daya saing perdagangan mencakup upaya: (i) penguatan kapasitas infrastruktur jalan, jembatan, terminal, pasar, pergudangan kota, infrastruktur komunikasi dan informasi; (ii) peningkatan jaringan kemitraan antar daerah dan pelaku dunia usaha; (iii) serta peningkatan kondusivitas keamanan daerah dan kemudahan perijinan usaha.

12. Peningkatan kualitas pembangunan manusia yang setara dan adil gender

Indek Pembangunan Manusia (IPM) merepresentasikan dampak program pembangunan pada kualitas penduduk selaku penerima manfaat pembangunan. IPM mengukur derajat kesehatan, kualitas pendidikan warga, serta kemampuan ekonomi (pendapatan/daya beli) penduduk. Oleh karena itu, strategi ini diharapkan menjadi kontrol perangkat daerah terkait supaya memilih program yang lebih terintegratif dan tepat sasaran membidik kontribusi signifikan pada peningkatan IPM.

13. Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian secara berkelanjutan

Strategi ini untuk memenuhi peran Kabupaten Boyolali sebagai lumbung pangan nasional, dan sebagai daya ungkit kesejahteraan masyarakat petani. Di dalam strategi ini terkandung kebutuhan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani, peningkatan kualitas petani untuk mengadopsi dan aplikasi teknologi, dan panduan arah perluasan sektor usaha industri pengolahan hasil atau wisata pertanian untuk memberikan nilai tambah dari sektor pertanian secara berkelanjutan.

14. Peningkatan produksi dan industri berbasis hasil peternakan dan perikanan

Sama halnya dengan sektor pertanian, strategi yang dikembangkan di sektor peternakan ini juga bermuara pada rangkaian proses memberi nilai tambah hasil produksi peternakan/perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan peternak. Strategi ini memerlukan langkah aksi terkait kebijakan daerah yang berpihak pada peternak, penguatan kapasitas

peternak untuk adopsi teknologi, perluasan pemasaran, dan nilai tambah hasil.

15. Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan kolaboratif

Strategi ini mendasari pengembangan Kabupaten Cerdas (*Smart City*), sebagai bagian dari pilar Kabupaten Cerdas. Kabupaten Cerdas adalah penyelenggaraan layanan publik yang dapat diakses dengan menggunakan teknologi informasi. Kabupaten Cerdas mewakili konsep pelibatan partisipasi masyarakat dalam memonitor dan memberikan umpan balik kepada pemerintah menggunakan teknologi informasi. Implementasi Kabupaten Cerdas akan mendorong pertumbuhan: (i). Pengembangan sistem informasi manajemen berbasis Teknologi Informasi (ii). Pengelolaan lingkungan berbasis Teknologi Informasi (iii). Pendidikan dan pengembangan SDM dengan karakter sosial budayanya melek teknologi (iv). Pengembangan citra/identitas kota pengembangan kewirausahaan, pengembangan aktivitas ekonomi/bisnis secara *online* dan (v). Berujung pada kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.

16. Peningkatan partisipasi masyarakat membangun daya saing dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi

Partisipasi masyarakat menggunakan teknologi informasi untuk pengembangan usaha ekonomi mandiri/wirausaha bermakna kontribusi bagi daerah membentuk pendapatan perkapita. Selain itu juga membantu memasarkan citra daerah, promosi wisata dan budaya sebagai arena promosi daya tarik daerah bagi dunia luar.

Partisipasi masyarakat menggunakan teknologi informasi juga dapat mendorong akuntabilitas publik dari pemerintah. Masyarakat dapat melakukan monitoring dan evaluasi berbasis komunitas, kemudian menyampaikan suaranya (umpan balik) kepada pemerintah secara cepat dan luas gaungnya melalui media interaktif berbasis teknologi informasi. Dengan demikian strategi ini secara tidak langsung mendorong kuatnya *democratic city*.

6.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan

strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya (Lampiran III Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, halaman 58). Hal ini berarti arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar lebih fokus, lebih detail sebagai petunjuk kapan pelaksanaannya di tahun keberapa dari tahapan pembangunan jangka menengah tersebut.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Penetapan tema atau fokus tahunan tidak berarti mengabaikan kondisi lain yang memang harus dikerjakan terus menerus setiap tahun. Alokasi program rutin dan penyelenggaraan layanan publik terus menerus ada dan dialokasikan anggaran. Hal ini didasari prinsip perencanaan strategik teknokratis. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; (2) Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Penyusunan tahapan pembangunan dalam RPJMD ini mengakomodir regulasi yang dikeluarkan Pemerintah pada saat penyusunan rancangan awal RPJMD, yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017. Surat edaran ini mengamanatkan bahwa bagi daerah yang periodisasi RPJMD-nya berakhir pada Tahun 2015, maka daerah tersebut dalam menyusun RPJMD Tahun 2016-2021 selain memuat perencanaan pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2021 juga harus memasukkan program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016.

Dalam rangka mengakomodir regulasi tersebut maka tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dibuat sebagai berikut:

Tema tahapan pembangunan Kabupaten Boyolali 2016-2021 digambarkan dalam Gambar 6.1.



Gambar VI.1. Tema Tahapan Pembangunan Kabupaten Boyolali 2016-2021

Adapun penjelasan pentahapan pembangunan Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021 per tahunnya sebagai berikut :

6.3.1. Arah Kebijakan Tahun 2016

RKPD Tahun 2016 mengusung tema prioritas "Meneruskan pro investasi menuju Boyolali yang Berdaya Saing, Konstitusional, Aman, Mandiri dan Sejahtera". Hal ini disusun dengan pertimbangan RKPD 2016 merupakan produk transisi, di mana RPJMD sebelumnya sudah berakhir sedangkan periode selanjutnya belum ada visi misi kepala daerah terpilih, sehingga menggunakan kerangka teknokratis berdasar RPJPD Kabupaten Boyolali dan merujuk RPJMN Tahun 2015-2019 serta Rancangan RKPD Tahun 2016 Provinsi Jawa Tengah.

Fokus prioritas RKPD Tahun 2016 pada: (i) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (ii) Pendidikan; (iii) Kesehatan; (iv) Penanggulangan Kemiskinan; (v) Ketahanan Pangan; (vi) Infrastruktur; (vii) Iklim Investasi dan Usaha; (viii) Lingkungan Hidup dan Bencana; (ix) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; (x) Perekonomian; (xi) Kesejahteraan Rakyat; (xii) Politik Hukum dan Keamanan.

6.3.2. Arah Kebijakan Tahun (2017)

Arah kebijakan pada periode tahun pertama memiliki makna strategis di mana kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema tahap-tahap berikutnya, tema pembangunan tahap ini adalah:

" Pemantapan Budaya Pro Investasi"

Pemantapan budaya pro investasi artinya, tahap ini meneruskan kebijakan periode RPJMD 2010-2015, dimana pemerintah dan masyarakat berkomitmen bersama mendukung keberlanjutan peningkatan investasi di daerah. Penyelenggaraan pembangunan Tahun 2017 diarahkan untuk membangun iklim yang semakin kondusif bagi pertambahan dan perluasan investasi. Komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali mengarahkan penggunaan investasi untuk mengembangkan diri sebagai Kabupaten Hijau, Kabupaten Air, dan Kabupaten Cerdas (*Smart City*). Komitmen tersebut perlu dukungan payung hukum regulasi daerah yang bersifat mengikat fokus alokasi anggaran. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi daya dukung masuknya investor. Selain fokus tahun pertama, agenda pembangunan juga tetap menangani urusan rutin dan pelayanan publik yang terus menerus berlangsung. Jadi program prioritas Tahun 2017 adalah yang mendukung:

1. Penyediaan regulasi daerah ramah investasi dan peningkatan skema KPS (Kerjasama Pemerintah-Swasta) untuk peningkatan kapasitas pembangunan daerah untuk mendukung prioritas: (i) Boyolali Kabupaten Air; (ii) Boyolali Kabupaten Hijau; (iii) Boyolali *Smart City*; dan (iv) Program Peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat;
2. Pengaturan struktur organisasi pemerintah beserta infrastruktur pendukungnya sesuai rasionalitas tuntutan kebutuhan untuk mendukung prioritas Program Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan pemenuhan kecukupan sarana prasarana pemerintahan menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
3. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur *E-governance* untuk mendukung prioritas *Smart City*;
4. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau;
5. Peningkatan produksi pertanian, peternakan/perikanan dan pemasaran hasil untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata, peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan; dan
6. Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusivitas wilayah.

Pada Tahun 2017 arah kebijakan yang dikembangkan adalah:

1. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang ramah investasi dan berbasis teknologi informasi;
2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang pro kesejahteraan rakyat;
3. Peningkatan layanan publik yang responsif dan akuntabel;

4. Peningkatan produksi dan industri berbasis hasil peternakan dan perikanan;
5. Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan kolaboratif; dan
6. Peningkatan partisipasi masyarakat membangun daya saing daerah dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi.

6.3.3. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2018)

Arah kebijakan pada periode tahun kedua memiliki makna strategis melanjutkan capaian tahap pertama dan menjadi pijakan dari tahap ketiga, tema pembangunan tahap ini adalah:

**" Pengembangan Infrastruktur Berwawasan
Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (*Smart City*) "**

Tahap ini melanjutkan komitmen sebelumnya, penggunaan investasi diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Hijau (termasuk Kabupaten air) dan *Smart City* sebagai monumen akhir RPJMD 2016-2021. Pondasi cita-cita tersebut dimulai dari penyediaan infrastruktur, baik infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, maupun infrastruktur sosial. Selain fokus tersebut, tahun kedua masih melanjutkan agenda tahun pertama yaitu menjaring investor dan investasi, serta pelayanan publik yang bersifat rutin berkelanjutan.

Prioritas Tahun 2018 secara garis besar diarahkan mendukung:

1. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan/perikanan, dan pemasaran hasil produksinya, serta pengembangan daya tarik destinasi dan jenis event pariwisata untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata dan budaya, peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan hidup;
2. Pengaturan struktur organisasi pemerintah beserta infrastruktur pendukungnya sesuai rasionalitas tuntutan kebutuhan untuk mendukung prioritas Program Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, dan program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
3. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur *E-governance*, peningkatan ketrampilan aparat dan penguatan kapasitas masyarakat mengoperasikan pelayanan berbasis teknologi; untuk mendukung prioritas *Smart City*;
4. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau, dan peningkatan pelayanan wajib dasar kesehatan dan pendidikan;
5. Implementasi regulasi daerah ramah investasi dan implementasi kerjasama pemerintah dengan swasta untuk peningkatan kapasitas pembangunan

daerah untuk mendukung prioritas: (i) Boyolali Kabupaten Air; (ii) Boyolali Kabupaten Hijau; (iii) Boyolali *Smart City*; dan (iv) Peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat;

6. Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusivitas wilayah.

Pada Tahun 2018 arah kebijakan yang dikembangkan yaitu:

1. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang ramah investasi dan berbasis teknologi informasi;
2. Pemenuhan dan Pemerataan akses infrastruktur;
3. Peningkatan layanan publik yang responsif dan akuntabel;
4. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang pro kesejahteraan rakyat;
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan kesejahteraan social;
6. Peningkatan kualitas layanan, kesehatan;
7. Peningkatan kualitas layanan pendidikan;
8. Peningkatan daya saing perdagangan;
9. Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian; dan
10. Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan kolaboratif.

6.3.4. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2019)

Arah kebijakan pada periode tahun ketiga masih melanjutkan fokus tahun kedua yang belum selesai, melanjutkan pelayanan rutin, dan mempersiapkan fokus tahun ketiga, tema pembangunan tahap ini adalah:

**" Pengembangan Daya Saing Daerah Berwawasan
Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (*Smart City*) "**

Tahap ini melanjutkan komitmen sebelumnya, penggunaan investasi diarahkan pengembangan geliat perekonomian masyarakat Kabupaten Boyolali dengan tetap menjaga orientasi perekonomian hijau (*Green Economy*). Geliat perekonomian juga diarahkan pada penggalian potensi khas yang dimiliki warga Kabupaten Boyolali dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial yang dimilikinya. Sektor ekonomi andalan adalah pertanian dan peternakan, peran khas Kabupaten Boyolali sebagai lumbung pangan nasional memberi dasar pengembangan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem pertanian. Prioritas Tahun 2019 secara garis besar diarahkan mendukung:

1. Implementasi regulasi daerah ramah investasi dan implementasi kerjasama pemerintah dengan swasta untuk peningkatan kapasitas pembangunan

- daerah untuk mendukung prioritas: (i) Boyolali Kabupaten Air; (ii) Boyolali Kabupaten Hijau; (iii) Boyolali *Smart City*; dan (iv) Peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat;
2. Penguatan kapasitas masyarakat mengoperasikan pelayanan berbasis teknologi, untuk mendukung prioritas *Smart City*;
 3. Program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan dan penunjang menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
 4. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau;
 5. Penguatan inovasi pengolahan hasil produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan/perikanan, terintegrasi dengan pemasaran, pariwisata untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata, peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan;
 6. Memperkuat partisipasi masyarakat dan optimalisasi kemandirian wilayah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdaya saing tinggi di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 7. Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusifitas wilayah;
 8. Pemasaran Citra Daerah, yaitu memasarkan popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali, di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan kebudayaan, termasuk nilai seni budaya, kawasan cagar budaya, dan peninggalan sejarah dan wisata religi.

Arah kebijakan yang dikembangkan pada Tahun 2019 yaitu:

1. Pemenuhan dan Pemerataan akses infrastruktur;
2. Peningkatan kondusifitas wilayah dan kesejahteraan social;
3. Peningkatan kesetaraan akses memperoleh pendapatan;
4. Peningkatan kualitas layanan pendidikan;
5. Peningkatan daya saing industri yang berbasis sumber daya local;
6. Peningkatan daya saing perdagangan;
7. Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian.

6.3.5. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2020)

Arah kebijakan pada periode tahun keempat masih melanjutkan fokus tahun kedua dan ketiga yang belum selesai, melanjutkan pelayanan rutin, dan mempersiapkan fokus tahun ketiga, tema pembangunan tahap ini adalah:

<p>"Memacu Produktivitas Daerah Yang Ramah Lingkungan dan Cerdas Untuk Kesejahteraan Masyarakat"</p>

Tahap ini melanjutkan komitmen tahap sebelumnya, bahwa negara (Pemerintah Kabupaten Boyolali) hadir untuk memberi perlindungan sosial

menuju kesejahteraan yang adil dan merata. Fokus tahap ini melanjutkan geliat ekonomi yang berwawasan lingkungan dan mengoptimalkan teknologi informasi. Jika produktivitas daerah meningkat, pendapatan per kapita meningkat, maka kesejahteraan sosial juga meningkat. Perlindungan jaminan sosial bagi kelompok rentan menjadi fokus tahap ini. Evaluasi kondisi kemiskinan daerah menjadi fokus tahap keempat sekaligus menganalisis apakah program peningkatan kualitas hidup manusia sudah tepat sasaran, tepat metode, dan tepat rangkaian kegiatan intervensinya. Prioritas Tahun 2020 secara garis besar diarahkan mendukung:

1. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan/perikanan, pariwisata dan kebudayaan untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata, peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan;
2. Program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau;
4. Pengembangan infrastruktur sosial untuk menurunkan resiko penyandang masalah kesejahteraan sosial;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dan optimalisasi kemandirian wilayah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdaya saing tinggi di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
6. Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusifitas wilayah; dan
7. Pemasaran citra daerah, yaitu memasarkan popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali, di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan kebudayaan.

Arah kebijakan yang dikembangkan Tahun 2020 yaitu:

1. Peningkatan kesetaraan akses memperoleh pendapatan;
2. Peningkatan kualitas layanan, kesehatan;
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan;
4. Peningkatan daya saing industri yang berbasis sumber daya lokal;
5. Peningkatan daya saing perdagangan;
6. Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian;
7. Peningkatan produksi dan industri berbasis hasil peternakan dan perikanan; dan
8. Peningkatan partisipasi masyarakat membangun daya saing daerah dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi.

6.3.6. Arah Kebijakan Tahun (2021)

Periode Tahun 2021 merupakan peluang penyempurnaan pencapaian target RPJMD, tercapainya masyarakat yang maju, berdaya saing, sejahtera dengan unggulan sebagai Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (*Smart City*), tema pembangunan tahap ini adalah:

" Kolaborasi Pemasaran Citra Kabupaten Boyolali "
--

Tahap ini merupakan periode pelengkap, jika ada target yang belum terpenuhi di tahapan berikutnya masih dilanjutkan pada tahun kelima. Secara khusus periode penutup RPJMD tahap III (2016-2021) ditekankan pada partisipasi masyarakat untuk mengembangkan kemandirian usaha perekonomian berbasis teknologi informasi. Aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial masyarakat diharapkan membantu pemerintah memasarkan citra kota (*branding*) sebagai daerah yang berdaya saing dengan berbagai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatifnya. Tahun kelima ini juga menjadi periode menguatkan partisipasi masyarakat sebagai pilar penyangga pemerintahan yang berdemokrasi. Prioritas Tahun 2021 secara garis besar diarahkan mendukung:

1. Pemasaran Citra Daerah, yaitu memasarkan popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali: pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata;
2. Program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau;
4. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan/perikanan, pariwisata dan kebudayaan untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata dan budaya, peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan;
5. Menguatkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi kemandirian wilayah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdaya saing tinggi di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; dan
6. Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusivitas wilayah.

Arah kebijakan yang akan dikembangkan pada Tahun 2021 adalah:

1. Peningkatan kesetaraan akses memperoleh pendapatan;
2. Peningkatan kualitas layanan, kesehatan;
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan;
4. Peningkatan produksi dan industri berbasis hasil peternakan dan perikanan;

5. Peningkatan partisipasi masyarakat membangun daya saing daerah dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi; dan
6. Peningkatan daya saing perdagangan.

Secara keseluruhan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali pada 5 (lima) tahun mendatang yang telah diintegrasikan dengan rekomendasi hasil KLHS adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel VI.3 berikut ini :

Tabel VI.3 Keterkaitan Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
	Misi 1: Boyolali Meneruskan semangat Pro Investasi		
	Tujuan 1: Meningkatkan jumlah nilai investasi		
1.	1.1.1. Tersedianya sistem layanan investasi yang kondusif	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang ramah investasi dan berbasis teknologi informasi	Penyediaan regulasi daerah ramah investasi
	1.1.2. Meningkatnya nilai investasi		Melanjutkan Reformasi sistem pelayanan perijinan ramah investasi
	Tujuan 2: Meningkatkan daya saing perekonomian, pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan		
	1.2.1. Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan	Reformasi tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berwawasan pembangunan berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	Penegakan Regulasi pengembangan bisnis/usaha ramah lingkungan
		Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH	Peningkatan RTH
	1.2.2. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berwawasan lingkungan (<i>green economy</i>)	Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan	Menyelaraskan tumbuhnya investasi pada pengembangan produk unggulan daerah yang berwawasan lingkungan
	Misi 2: Boyolali membangun untuk Untuk Lebih Maju dan Berkelanjutan.		
	Tujuan 3: Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing dan kesejahteraan daerah		
2.	2.1.1. Terpenuhinya infrastruktur dasar	Pemenuhan dan Pemerataan akses infrastruktur	Pengembangan kerjasama multi pihak untuk pembangunan infrastruktur, termasuk partisipasi masyarakat
	2.1.2.		Pengembangan infrastruktur yang

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
	Terpenuhinya infrastruktur penunjang		mengungkit pencapaian daya saing ekonomi, Kabupaten Hijau, Kabupaten Cerdas (<i>Smart City</i>)
	2.1.3. Terpenuhinya infrastruktur sosial		Pengembangan infrastruktur berdasarkan rasio kebutuhan pelayanan publik
	Misi 3: Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera		
	Tujuan 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, anti KKN, responsif dan akuntabel		
3.	3.1.1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	Peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang pro kesejahteraan rakyat	Peningkatan kualitas perencanaan, tatalaksana penganggaran, pengelolaan keuangan daerah dan sinergitas sistem informasi daerah dengan sistem informasi pemeriksaan serta peningkatan kapasitas pemeriksa/auditor
	3.1.2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Peningkatan layanan publik yang responsif dan akuntabel	Pengaturan struktur organisasi pemerintah beserta infrastruktur pendukungnya sesuai rasionalitas tuntutan kebutuhan berdasarkan regulasi yang berlaku
			Optimalisasi kemandirian pelayanan masyarakat
			Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
			Penyediaan ruang monitoring, evaluasi, dan komplain.
	Tujuan 5: Mewujudkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial		
	3.2.1. Terwujudnya masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Peningkatan kondusivitas wilayah dan kesejahteraan sosial	Peningkatan upaya pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
			Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
	Misi 4: Boyolali sehat, produktif, berdaya saing		
	Tujuan 6: Meningkatkan kualitas pembangunan manusia mendukung produktivitas dan daya saing daerah		
4.	4.1.1. Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat	Peningkatan kesetaraan akses memperoleh pendapatan	Peningkatan produktivitas UMK, kualitas produk dan jangkauan pemasarannya
			Peningkatan kemampuan berusaha bagi perempuan

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
	4.1.2. Meningkatnya Derajat kesehatan	Peningkatan kualitas layanan, kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
			Pemerataan infrastruktur kesehatan
			Peningkatan kesadaran masyarakat promosi dan preventif kesehatan
	4.1.3. Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk	Peningkatan kualitas layanan pendidikan	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan anak usia dini, dasar dan masyarakat serta peningkatan kualitas manajemen pelayanannya
			Pemerataan infrastruktur pendidikan formal dan non formal
			Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
	4.1.4. Meningkatnya daya saing industri	Peningkatan daya saing industri yang berbasis sumber daya lokal	Pengembangan produktivitas dan kualitas hasil sektor industri pertanian, peternakan, perikanan untuk meningkatkan daya saing daerah
	4.1.5. Meningkatnya daya saing perdagangan	Peningkatan daya saing perdagangan	Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung perdagangan
			Mengembangkan sistem perdagangan untuk meningkatkan daya saing daerah
	Misi 5: Boyolali Lumbung Padi dan Pangan Nasional		
	Tujuan 7: Meningkatkan produksi bahan pangan pertanian sebagai lumbung pangan nasional		
5.	5.1.1. Meningkatnya produksi bahan pangan untuk berkontribusi pada pasar nasional	Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian	Peningkatan produksi pertanian dan pemasaran hasil
			Pengembangan teknologi untuk peningkatan nilai tambah hasil pertanian
	Misi 6: Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan		
	Tujuan 8: Meningkatkan produksi bahan pangan dari usaha peternakan/perikanan		
6.	6.1.1. Meningkatnya produksi, pengolahan hasil ternak dan	Peningkatan produksi dan industri berbasis hasil peternakan dan perikanan	Pengembangan kebijakan daerah yang kondusif bagi peningkatan produksi peternakan/perikanan dan pemasaran hasil produk pertanian/peternakan/perikanan.

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
	perikanan untuk berkontribusi pada pasar nasional		Pengembangan teknologi untuk peningkatan nilai tambah hasil peternakan/ perikanan
	Misi 7: Boyolali lebih maju dan berteknologi		
	Tujuan 9: Meningkatkan pemasaran citra daerah dan pelayanan publik melalui teknologi informasi menuju Kabupaten Cerdas (<i>Smart City</i>)		
7.	7.1.1. Meningkatnya layanan pemerintahan yang dapat dioperasikan dengan teknologi informasi	Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan kolaboratif	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pengembangan <i>E-governance</i>
			Peningkatan ketrampilan aparat memberikan pelayanan berbasis teknologi (<i>smart city</i>)
	7.1.2. Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali	Peningkatan partisipasi masyarakat membangun daya saing daerah dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi	Mendorong masyarakat berkolaborasi dengan pemerintah memasarkan citra dari wisata dan budaya Kabupaten Boyolali (<i>branding</i>)

6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah Terpadu

6.4.1. Strategi Penataan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah Terpadu

Tersebut dalam Perda Nomor. 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 bahwa tujuan penataan ruang adalah pemerataan pembangunan yang terintegrasi di seluruh wilayah kabupaten yang berbasis pertanian dan pengembangan aneka industri maka perlu disusun beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- a. Strategi pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian meliputi:
 - 1) Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
 - 2) Meningkatkan produktivitas pertanian dan pemasaran produk hasil pertanian;
 - 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian;
 - 4) Mengembangkan irigasi pertanian;
 - 5) Mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah;
 - 6) Mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering;
 - 7) Menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - 8) Mengembangkan kawasan pusat pengembangan agropolitan.

- b. Strategi pengembangan wilayah industri meliputi:
 - 1) Meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investasi;
 - 2) Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga;
 - 3) Mengembangkan wilayah industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman; dan
 - 4) Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan rumah tangga.
- c. Strategi pengoptimalan produktivitas kawasan peruntukan perikanan meliputi:
 - 1) Mengembangkan perikanan budidaya air tawar;
 - 2) Mengembangkan minapolitan;
 - 3) Mengoptimalkan produktivitas kawasan peruntukan perikanan; dan
 - 4) Mengembangkan perikanan ramah lingkungan.
- d. Strategi pengembangan pusat-pusat meliputi:
 - 1) Membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki; dan
 - 2) Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara sinergis.
- e. Strategi pengembangan mutu dan jangkauan sarana dan prasarana penunjang kegiatan meliputi:
 - 1) Mengembangkan sarana prasarana sesuai skala pelayanan dan memperhatikan kebijakan tata ruang; dan
 - 2) Mengembangkan sistem informasi dan teknologi dalam meningkatkan kegiatan di perkotaan dan perdesaan.
- f. Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan udara :
 - 1) Mengembangkan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
 - 2) Mengoptimalkan pengembangan sistem transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya;
 - 3) Mengembangkan fasilitas pelayanan dan infrastruktur penunjang; dan
 - 4) Mengoptimalkan tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan.
- g. Strategi pengendalian dan pelestarian kawasan lindung meliputi:
 - 1) Memulihkan fungsi lindung;
 - 2) Mencegah perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung;
 - 3) Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan kawasan; dan
 - 4) Menghindari kawasan yang rawan bencana sebagai kawasan terbangun.

- h. Strategi pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi daya dukung lingkungan meliputi:
 - 1) Meningkatkan kegiatan yang mendorong pengembalian fungsi lindung;
 - 2) Menjaga kawasan lindung dari kegiatan budidaya;
 - 3) Mempertahankan luasan hutan lindung;
 - 4) Meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung; dan
 - 5) Mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perlindungan setempat dan ruang evakuasi bencana alam.
- i. Strategi pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - 1) Mengembangkan kegiatan ekonomi skala besar;
 - 2) Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - 3) Menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - 4) Mengembangkan kerjasama dalam penyediaan tanah.
- j. Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
 - 1) Mendukung penetapan Kawasan Strategi Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - 2) Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
 - 3) Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - 4) Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu, Pembangunan Wilayah Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan PWT adalah pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Penentuan lokasi Pembangunan Wilayah Terpadu erat kaitannya dengan kebijakan pemilihan Kawasan Strategis. Adapun penetapan kawasan strategis Kabupaten, meliputi:

- a. Pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Penetapan kawasan strategis sosial dan budaya; dan
- c. Penetapan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Penetapan Pengembangan Kawasan Terpadu adalah dengan Pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan cepat tumbuh pada koridor jalan arteri nasional secara ketat dan terbatas dan pengembangan kawasan agropolitan untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan; terdiri atas:

- a. Koridor kawasan strategis Subosukawonosraten;

Wilayah ini sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi metropolitan Solo Raya terdiri dari kawasan perkotaan Kota Surakarta dan sekitarnya yaitu Kartasura, Sukoharjo, Ngemplak, Mojosongo, Colomadu, Karanganyar, Jaten dan Sragen. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri dari Boyolali dan Klaten, sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Wonogiri dan Boyolali (Ampel).

Sektor unggulan wilayah Subosukowonosraten adalah pariwisata, industri dan pertanian. Sedangkan potensi regional meliputi: (1) primer berupa pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan; (2) sekunder berupa industri kayu, produk tekstil, batik, jamu, kerajinan; dan (3) tersier berupa perdagangan dan pariwisata.

Potensi unggulan di kabupaten Boyolali yang terus dikembangkan yaitu: Industri unggulan tembaga, pupuk organik; agropolitan Goasebo, STA Ampel di Kecamatan Ampel, dengan komoditas unggulan pepaya, salak, jahe, kobis, bunga kol, wortel, tomat dan cabe; minapolitan kampung lele di Kecamatan Banyudono, Sawit dan Teras.

- b. Alur kawasan Solo Selo Borobudur (SSB);

Sebagai kawasan strategis provinsi dengan destinasi wisata kawasan wisata Selo, unggulan wisata Solo-Selo-Borobudur;

- c. Kawasan minapolitan meliputi, kecamatan Teras, Sawit dan Banyudono;
- d. Kawasan agropolitan meliputi, kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, Sawit dan Banyudono;
- e. Kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang jalan arteri, kolektor dan lokal;

- f. Wilayah perbatasan, Kecamatan Sawit dan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dengan Kecamatan Gatak dan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa pada sepanjang jalan arteri;
- g. Wilayah perbatasan, Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dengan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dikembangkan sebagai kawasan peruntukan industri; dan
- h. Kawasan wisata meliputi:
 - 1) Kawasan wisata alam Selo di Kecamatan Selo;
 - 2) Kawasan wisata Tlatar di Kecamatan Boyolali;
 - 3) Kawasan wisata Pengging di Kecamatan Banyudono;
 - 4) Kawasan wisata Waduk Cengklik di Kecamatan Ngemplak;
 - 5) Kawasan wisata Waduk Bade di Kecamatan Klego; dan
 - 6) Kawasan wisata Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Kemusu.

6.4.2. Arah Kebijakan Penataan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah Terpadu
Guna mencapai tujuan dan melaksanakan strategi tersebut diatas, maka diperlukan arah kebijakan sbb:

- a. Pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian;
- b. Pengembangan wilayah industri;
- c. Pengoptimalan produktivitas kawasan peruntukan perikanan;
- d. Pengembangan pusat-pusat pelayanan;
- e. Pengembangan mutu dan jangkauan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- f. Pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan udara;
- g. Pengendalian dan pelestarian kawasan lindung;
- h. Pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi daya dukung lingkungan;
- i. Pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- j. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.